

DOKUMEN



PERATURAN NAGARI

NO 08 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

NAGARI LUNANG TIGA KECAMATAN LUNANG

KABUPATEN PESISIR SELATAN

TAHUN 2018 – 2024



PEMERINTAH NAGARI LUNANG TIGA

TAHUN 2018



DOKUMEN

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
NAGARI LUNANG TIGA KECAMATAN LUNANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2018 - 2024**

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah akhirnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJMNag) Nagari Lunang Tiga Tahun 2018 - 2024 sudah selesai disusun. Penyusunan RPJMNag yang diawali dari proses penggalian gagasan sampai musyawarah dalam rangka menggagas masa depan nagari, penyusun yang terdiri dari Pemerintah Nagari Lunang Tiga dan BAMUS Nagari Lunang Tiga berhasil menyusun dokumen RPJMNag dan Rencana Kerja Pembangunan Nagari (RKPNag) Nagari Lunang Tiga tahun 2019.

RPJMNag adalah bagian dari program perencanaan seluruh warga masyarakat Nagari Lunang Tiga yang menginginkan perubahan yang lebih baik di segala bidang. Masa Depan akan terlihat jika dimulai dengan perencanaan yang matang dan disertai kerja keras dan usaha untuk mewujudkannya.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJMNag) Nagari Lunang Tiga Tahun 2018 - 2024 dilakukan secara partisipatif yang melibatkan segenap pemangku kepentingan pembangunan daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJMNag) Nagari Lunang Tiga Tahun 2018 - 2024 akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kegiatan Pembangunan Nagari (RKPNag) pada setiap tahun anggaran. Dokumen ini diharapkan sudah dapat mewakili aspirasi dari seluruh lapisan masyarakat. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang membantu sehingga penyusun dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen RPJMNag.

Harapan kami semoga Dokumen ini bisa menjadi tolak ukur Pembangunan di Nagari Lunang Tiga Kecamatan Lunang dan semoga kita senantiasa mendapat perlindungan dan ridlo dari Allah SWT sehingga Rencana Pembangunan bisa terealisasi dengan baik. Amiin

Alhamdulillah Robbil 'Alamin.

Lunang Tiga, 18 September 2018

Ketua Tim Penyusun

DAFTAR ISI

SISTEMATIKA RPJM NAGARI

Cover

Peraturan Nagari Tentang RPJM

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Tabel

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1, Latar Belakang
- 1.2, Landasan Hukum
- 1.3, Maksud dan Tujuan
- 1.4, Manfaat

BAB II PROFIL NAGARI

- 2.1, Sejarah Nagari
- 2.2, Peta dan Kondisi Nagari
- 2.3, Kelembagaan Nagari
- 2.4, Dinamika Konflik
- 2.5, Masalah dan Potensi

BAB III PROSES PENYUSUNAN RPJM NAGARI

- 3.1, Pengkajian Nagari
- 3.2, Musyawarah Nagari RPJM Nagari

BAB IV VISI, MISI DAN PROGRAM INDIKATIF (ENAM TAHUN)

- 4.1, Visi Nagari
- 4.2, Misi Nagari
- 4.3, Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nagari

BAB V PENUTUP

Lampiran :

- 1. Peta Sosial Nagari
- 2. Tabel (Matrik) Program/Kegiatan Enam Tahun
- 3. Berita Acara dan Daftar Hadir
- 4. SK Tim Penyusun RPJM Nagari

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Perencanaan yang baik diperlukan dalam setiap pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah nagari bersama - sama dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*). Perencanaan yang meliputi perencanaan jangka panjang, menengah, maupun pendek sangat diperlukan agar pembangunan dapat berjalan pada jalur yang tepat.

UU 32/2004, tentang Otonomi Daerah dan UU no. 06/2014 tentang Desa. Menempatkan Desa dapat memanfaatkan dan mengelola sendiri Alokasi Dana di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Prasyarat pemanfaatan Dana sendiri mengharuskan Pemerintah Nagari menetapkan Pernag tentang RPJM Nagari. Berpijak dari hal - hal tersebut maka diperlukan proses - proses perencanaan pembangunan utamanya di tingkat nagari yang melibatkan partisipasi langsung warga masyarakat. Sekaligus proses perencanaan pembangunan yang lebih reguler dan formal semacam musrenbang, maupun dalam proses perencanaan pembangunan seperti diatur dalam UU atau peraturan - peraturan pemerintah yang lain.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah nagari (RPJMNag) Nagari Lunang Tiga tahun 2018 - 2024, yang ditetapkan dengan Peraturan Nagari adalah dokumen Induk dari perencanaan pembangunan Nagari, memuat Visi, Misi, Arah Kegiatan Pembangunan, didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata Nagari Lunang Tiga, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang di Nagari Lunang Tiga. RPJM Nagari Lunang Tiga sebagai rencana induk untuk melakukan kegiatan pembangunan nagari, disusun oleh semua elemen masyarakat yang ada di Nagari Lunang Tiga atau yang mewakilinya serta semua pihak yang berkepentingan. RPJM Nagari Lunang Tiga sebagai penjabaran dari visi dan misi nagari, juga memuat kerangka ekonomi nagari, arah kebijakan keuangan nagari, strategi pembangunan nagari, kebijakan umum, dan disertai macam - macam program kegiatan dengan pendanaan yang bersifat indikatif. Selain sebagai petunjuk dan penentu arah kebijakan, dokumen ini juga digunakan untuk dasar penilaian kinerja Perangkat Nagari Lunang Tiga dalam melaksanakan Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat selama masa jabatannya. Dokumen ini juga dapat digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan Perangkat Nagari Lunang Tiga dalam laporan penyelenggaraan pemerintah nagari dan Laporan Keuangan

pertanggung jawaban Wali Nagari Lunang Tiga yang diserahkan kepada BAMUS maupun kepada masyarakat umum.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Penyusunan RPJM Nagari Lunang Tiga tahun 2018 - 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Nagari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Nagari (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2094);

9. Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158)
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 112 / PMK.07 / 2017tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 / Pmk.07 / 20 1 7 Tentang Pengelolaan TransFer Ke Daerah Dan Dana Desa
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Nagari.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005 – 2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010 – 2030;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 121 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Lunang Tiga.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

RPJM Nagari Lunang Tiga Tahun 2018 – 2024 disusun dengan maksud menyediakan dasar dan pedoman resmi bagi pemerintah Nagari Lunang Tiga, BAMUS, Lembaga Kemasyarakatan Nagari, dan semua elemen masyarakat beserta semua pihak yang berkepentingan dalam pembangunan Nagari Lunang Tiga. Selain

itu, dokumen ini menjadi acuan penentuan pilihan - pilihan program kegiatan tahunan nagari yang akan dibahas dalam rangkaian forum musyawarah perencanaan pembangunan secara berjenjang. Untuk itu isi dan substansinya mencakup indikasi rencana program dan kegiatan secara lintas sektoral serta sumber pembiayaan, baik dari APB Nagari Lunang Tiga, Unit anggaran dari jenjang di atasnya maupun dari semua pihak yang berkepentingan dengan pembangunan Nagari Lunang Tiga.

1.3.2. Tujuan

Berdasarkan pertimbangan tersebut, RPJM Nagari Lunang Tiga tahun 2018 - 2024 disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Menyediakan dasar dan pedoman resmi bagi seluruh jajaran aparatur pemerintah Nagari Lunang Tiga, BAMUS, Lembaga - lembaga Kemasyarakatan, seluruh elemen masyarakat serta semua pihak yang berkepentingan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai dari APB Nagari Lunang Tiga dan anggaran dari jenjang unit pemerintahan di atasnya serta sumber lain yang sah.
2. Menyediakan satu tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap unsur/bidang di dalam Pemerintahan Nagari, serta sebagai bahan bagi perencanaan dan penganggaran Pembangunan Tahunan Nagari.
3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum Nagari sekarang, sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai pada kurun waktu enam tahun dalam rangka mewujudkan visi dan misi nagari.
4. Memudahkan seluruh jajaran Pemerintahan Nagari, BAMUS dan Lembaga-lembaga kemasyarakatan, elemen lain dan semua pihak yang berkepentingan dalam mencapai tujuan dengan menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
5. Memudahkan jajaran aparatur Pemerintahan Nagari, BAMUS, Lembaga-lembaga Kemasyarakatan, seluruh elemen masyarakat nagari dan semua pihak yang berkepentingan untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan pembangunan tahunan dalam kurun waktu enam tahun.
6. RPJM Nagari Lunang Tiga dapat menjadi masukan bagi RPJM Pemerintah Kabupaten,Provinsi dan Pusat.

1.4. Manfaat

Manfaat RPJM Nagari Lunang Tiga adalah sebagai :

1. Sebagai pedoman dalam menyusun RKP Nagari, sehingga menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi.
2. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang sesuai kebutuhan dan keadaan setempat dan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup masyarakat,
3. Menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab bersama terhadap program pembangunan,
4. Memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan (keberlanjutan),
5. Mendorong dan menumbuh kembangkan partisipasi dan keswadayaan dalam pembangunan
6. Sebagai ruang interaksi antara masyarakat dengan pemerintah supraNagari.

BAB II

PROFIL NAGARI

2.1. Sejarah Nagari

Nagari Lunang Tiga Pada awal Mulanya Adalah Desa Tanjung Sari Yang Merupakan Bagian Wilayah Nagari Lunang Kecamatan Perwakilan Pancung Soal. Pada Tahun 1982 Mulailah Daerah Lunang Didatangkan Oleh Pemerintah Yaitu Transmigran Dari Pulau Jawa Dan Masyarakat Lokal.

Pada Tahun 1982 Nagari Lunang Tiga Yang Dulunya Bernama Desa Tanjung Sari (Blok D) Didatangkan Transmigran Dari Pulau Jawa. Setelah Adanya Perkembangan Dan Mengalami Masa – Masa Sulit Nagari Lunang Tiga Yang Dulunya Desa Tanjung Sari Menjadi Desa Percontohan Sampai Pada Pemerintah Pusat.

Seiring Dengan Berjalannya Waktu Dan Perkembangan Zaman Dan Lahirnya Undang – Undang Otonomi Daerah Maka Desa Tanjung Sari Berubah Menjadi Nagari Lunang. Maka Desa Tanjung Sari Menjadi Kampung / Jorong Yang Terbagi Dalam 4 (Empat) Kampung :

1. Tanjung Sari I
2. Tanjung Sari II
3. Tanjung Sari III
4. Tanjung Sari IV

Setelah Mengalami Beberapa Proses Pengajuan Pemekaran Nagari Maka Pada Tahun 2007 Dimekarkanlah Nagari Lunang Induk Menjadi 3 (Tiga) Nagari Yaitu Lunang, Tanjung Beringin Dan Lunang Barat.

Bahkan Masyarakat Tidak Terhenti Sampai Disitu Untuk Mengusahakan Supaya Nagari Ini Bisa Dimekarkan Lagi Menjadi Beberapa Nagari Dan Alhamdulillah Pada Tahun 2011 sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir selatan Nomor 121 tahun 2011 tentang pembentukan nagari Lunang Tiga, Nagari Lunang Barat Dimekarkan Lagi Menjadi 3 (Tiga) Nagari Yaitu Nagari Lunang Barat, Nagari Lunang Dua, Nagari Lunang Tiga. Berikut ini kami tampilkan daftar tabel kepala desa/wali nagari.

Tabel 01. Data Kepala Desa/Wali Nagari Mulai Dari adanya Nagari Lunang Tiga

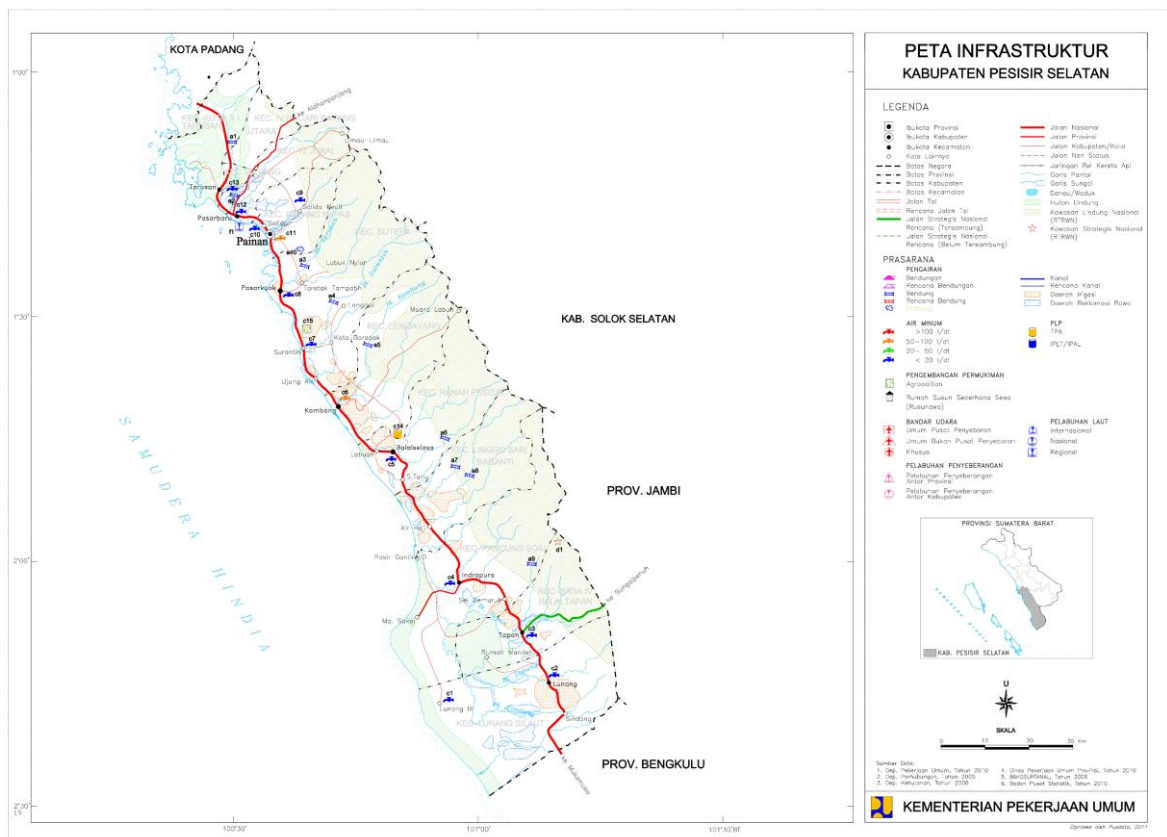
No	Nama	Masa Jabatan	Keterangan
1	SUROSO	1982 - 1990	Pemb. KUPT Lunang
2	SUKARNO	1990 - 1991	PJS Kepala Desa Tanjung Sari
3	SUTARYO	1991 - 1992	Kepala Desa Tanjung Sari
4	SYAHBUDIN HUSEIN	1992 - 2002	Kepala Desa Tanjung Sari
5	BUSTAMI. Dt MP	2002 - 2009	Wali Nagari Lunang
6	RAMBAT MULYADI	2009 - 2011	Wali Nagari Lunang Barat
7	JUMARI	2011 - 2017	Wali Nagari Lunang Tiga
8	M. SOBIRIN. SH	2018 - Sekarang	Wali Nagari Lunang Tiga

2.2. Peta dan Kondisi Geografis

a. Letak Wilayah

Berdasar letak geografis wilayah, Nagari Lunang Tiga berada antara $2^{\circ}17'19.28''$ S dan $101^{\circ}05'12.12''$ T. , dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Nagari Lunang Dua
- Sebelah Timur : Nagari Lunang Barat
- Sebelah Selatan : Nagari Sindang Lunang
- Sebelah Barat : Nagari Lunang.



b. Luas Wilayah

Secara Topografi, Nagari Lunang Tiga dapat dikatakan berada di wilayah dataran rendah. Luas Wilayah Nagari Lunang Tiga 17,72 Km² yang ada terbagi dalam beberapa kategori, dapat dikelompokkan seperti untuk fasilitas umum, pemukiman, pertanian/perkebunan.

Secara Administratif wilayah Nagari Lunang Tiga terdiri dari 15 RT, dan 3 Kampung.

Dengan luas permukiman penduduk sebagai berikut :

1. Kampung Marga Mulya 4,48 Km²
2. Kampung Tanjung Mulya 2,76 Km²
3. Kampung Ujung Jaya 2,54 Km²

Dengan kondisi topografi demikian, Nagari lunang tiga memiliki variasi ketinggian antara 5 m sampai dengan 30 m dari permukaan laut.

c. Demografi

Berdasarkan Data Administrasi Pemerintahan Nagari, jumlah penduduk yang tercatat secara administrasi, berjumlah 2.369 jiwa tahun 2017. Adapun rincian penduduk berjenis secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2: Perkembangan Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah penduduk jiwa
		Tahun 2017
1	Laki-laki	1.210 (51,%)
2	Perempuan	1.159 (49,%)
JUMLAH		2.369

Sumber: profil desa

Tabel 3: Perkembangan Jumlah Kepala Keluarga

No	Kampung	Jumlah Kepala Keluarga
		Tahun 2017
1	Kp. Marga Mulya	247 KK
2	Kp. Ujung Jaya	184 KK
3	Kp. Tanjung Mulya	258 KK
JUMLAH		689 KK

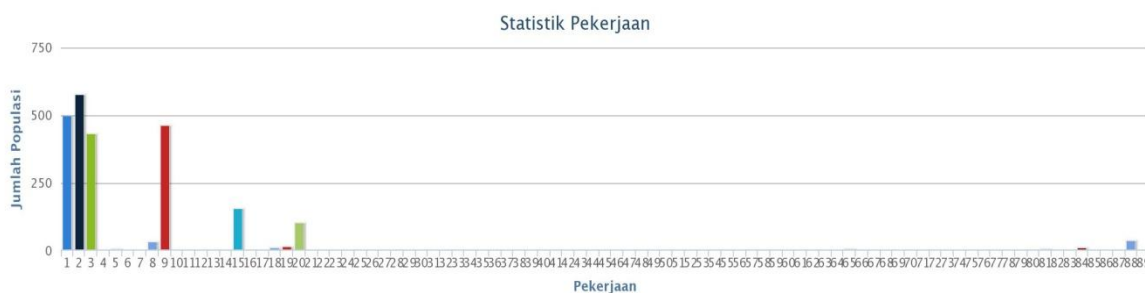
Tabel 04: Jumlah Penduduk sesuai kelompok Umur

No	Jenis Kelompok	Jumlah	Laki-laki	Perempuan
1	0 S/D 5 TAHUN	168	84	84
2	6 S/D 15 TAHUN	414	201	213
3	16 S/D 25 TAHUN	395	197	198
4	26 S/D 35 TAHUN	411	209	202
5	36 S/D 45 TAHUN	393	208	185
6	46 S/D 60 TAHUN	390	206	184
7	61 S/D 75 TAHUN	162	83	79
8	DI ATAS 75 TAHUN	38	24	14
	BELUM MENGISI	-2	-2	0
	TOTAL	2369	1210	1159

Tabel 05. Jumlah Penduduk Nagari Lunang Tiga Sesuai Tingkat Pendidikan

No	Jenis Kelompok	Jumlah	Laki-laki	Perempuan
1	TIDAK / BELUM SEKOLAH	550	249	301
2	BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT	382	189	193
3	TAMAT SD / SEDERAJAT	689	366	323
4	SLTP/SEDERAJAT	455	263	192
5	SLTA / SEDERAJAT	242	119	123
6	DIPLOMA I / II	13	7	6
7	AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA	8	3	5
8	DIPLOMA IV/ STRATA I	30	14	16
9	STRATA II	0	0	0
10	STRATA III	0	0	0
	BELUM MENGISI	0	0	0
	TOTAL	2369	1210	1159

Tabel 06. Statistik Jumlah Penduduk Menurut Pekerjaan



Tabel 07. Statistik Jumlah Penduduk Menurut Agama

No	Jenis Kelompok	Jumlah	Laki-laki	Perempuan
1	ISLAM	2365	1209	1156
2	KRISTEN	4	1	3
3	KATHOLIK	0	0	0
4	HINDU	0	0	0
5	BUDHA	0	0	0
6	KHONGHUCU	0	0	0
7	KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YME	0	0	0
	BELUM MENGISI	0	0	0
	TOTAL	2369	1210	1159

d. Kondisi Sosial Nagari

Mayoritas mata pencarian penduduk Nagari Lunang Tiga bergerak dibidang pertanian/Perkebunan Permasalahan yang sering muncul berkaitan dengan mata pencaharian penduduk adalah terbatasnya lapangan pekerjaan yang sesuai dengan tingkat perkembangan penduduk sebagaimana tertuang dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Hal lain yang perlu diperhatikan dalam pembangunan nagari adalah melakukan usaha perluasan kesempatan kerja dengan melakukan penguatan modal dan fasilitasi sebagai modal untuk pengembangan usaha khususnya di ekonomi produktif.

Tingkat angka kemiskinan Nagari Lunang Tiga yang masih relative rendah rata – rata 5 % jumlah KK Miskin menjadikan Nagari Lunang Tiga masuk dalam kategori nagari Maju sesuai dengan data indeks desa membangun tahun 2017. Ditunjukkan pada tabel berikut ini :

Tabel 08 : Data Indeks Kemiskinan Penduduk dalam KK

No	Kategori	Nilai Rata – Rata	Ket
1	KK Miskin	5 % / Jumlah KK	
2	KK Kategori Sedang	50 % / Jumlah KK	
3	KK kategori Kaya	45 % / Jumlah KK	

Sumber : Data Survey IDM 2017.

2.3. Kelembagaan Nagari

Sasaran pokok pembangunan nagari adalah tercapainya kondisi ekonomi rakyat di nagari yang kukuh, dan mampu tumbuh secara mandiri dan berkelanjutan. Sasaran pembangunan pedesaan diupayakan secara bertahap dengan langkah.

1. Peningkatan kualitas tenaga kerja di Nagari;
2. Peningkatan kemampuan aparatur pemerintah nagari;
3. Penguatan lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat nagari;
4. Pengembangan kemampuan sosial ekonomi masyarakat nagari;
5. Pengembangan sarana dan prasarana nagari; dan
6. keterpaduan pembangunan nagari berwawasan lingkungan.

Salah satu misi yang diusung oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah membangun harmonisasi antara desa dalam kawasan perdesaan. Permasalahan yang mengakibatkan munculnya ketimpangan berbagai kutub perencanaan tersebut adalah rendahnya mutu proses dan mutu hasil perencanaan partisipatif. Disamping itu, hasil-hasil perencanaan partisipatif belum mampu dikanalisis untuk mewarnai hasil perencanaan teknokratis dan perencanaan politis.

Berangkat dari kenyataan tersebut diatas, maka Kelembagaan nagari di nagari lunang tiga ingin mencoba terobosan baru dengan upaya memperkuat proses perencanaan partisipatif untuk memperkuat perangkat nagari dalam meningkatkan kualitasnya dalam menyongsong pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam mencapai kesejahteraannya dan menjadi nagari yang berkualitas.

Salah satu Kelembagaan nagari yang merupakan mitra kerjanya adalah Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS), Sebagai salah satu Kelembagaan Nagari yang mempunyai tugas fungsi sebagai perwujudan wakil masyarakat / rakyat adalah :

1. Menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di nagari.
2. Merumuskan dan menetapkan Peraturan nagari bersama Pemerintah nagari.

3. Mengawasi pelaksanaan Peraturan nagari, Anggaran Pendapatan dan Belanja nagari serta keputusan Wali Nagari.
4. Menampung aspirasi masyarakat dan menyalurkan aspirasi tersebut kepada pejabat/instansi yang berwenang.

Didalam pembentukan kelembagaan nagari di nagari lunang tiga selalu melalui Musyawarah nagari dengan melibatkan kelompok - kelompok perempuan didalam pengambilan keputusan. Adapun Kelembagaan nagari tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pemerintahan Umum Nagari
2. Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS)
3. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN)
4. Karang Taruna
5. Linmas Nagari
6. PKK

1. Pemerintahan Umum Nagari

Untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di sektor pemerintahan umum, Nagari Lunang Tiga. telah sejak lama memberikan pelayanan antara lain berupa : pencatatan sipil/surat-surat keterangan perkawinan yang telah teradministrasi dengan baik. Selain itu guna memenuhi persyaratan administrasi perijinan, juga telah secara rutin memberikan surat keterangan usaha kepada warga masyarakat Nagari maupun pihak lain yang akan membuka usaha di Nagari Lunang Tiga Peng-administrasian perijinan juga telah dilakukan dengan baik, meskipun diperlukan penyempurnaan/perbaikan demi kepentingan kearsipan.

Ketentraman dan ketertiban nagari menjadi prioritas Nagari Lunang Tiga. Hal itu dikarenakan dengan terjaminnya ketentraman dan ketertiban wilayah akan berdampak pula dengan kondisi perekonomian masyarakat, kerukunan/kegotong royongan, dan kehidupan yang layak bagi masyarakat Nagari Lunang Tiga dan sekitarnya. Kesemuanya itu akan berdampak positif terhadap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan di Nagari Lunang Tiga.

Nagari Lunang Tiga terdiri dari 3 Wilayah Kampung, dan 15 RT. Sesuai dengan table 09 berikut ini SOTK Pemerintahan Nagari Lunang Tiga.

Tabel 09: Struktur Pemerintah Nagari Lunang Tiga



2. BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI (BAMUS)

Merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Nagari. BAMUS dapat dianggap sebagai "parlemen"-nya Nagari. BAMUS merupakan lembaga baru di Nagari pada era otonomi daerah di Indonesia.

Anggota BAMUS adalah wakil dari penduduk nagari bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota BAMUS terdiri dari pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BAMUS adalah 6 tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Pimpinan dan Anggota BAMUS tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Nagari dan Perangkat Nagari.

Peresmian anggota BAMUS ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota, dimana sebelum memegang jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati/ Walikota. Ketua BAMUS dipilih dari dan oleh anggota BAMUS secara langsung dalam Rapat BAMUS yang diadakan secara khusus. BAMUS berfungsi menetapkan Peraturan Nagari bersama Wali Nagari, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Pada tabel 10 menunjukkan susunan keanggotaan BAMUS Nagari Lunang Tiga Periode 2017 – 2023.

Table 10: Struktur Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS)



3. LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKATAN NAGARI / LPMN

a. Pembentukan

1. Di Nagari dapat dibentuk Lembaga Pemberdayaan Kemasyarakatan.
2. Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dapat dibentuk atas prakarsa yang difasilitasi Pemerintah melalui musyawarah dan mufakat.
3. Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Nagari ditetapkan dalam Keputusan Wali Nagari.
4. Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Nagari ditetapkan oleh Wali Nagari.

b. Maksud :

Maksud dibentuknya lembaga kemasyarakatan adalah :

1. Sebagai upaya memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang berasaskan gotong royong dan kekeluargaan;
2. Sebagai upaya meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
3. Sebagai upaya menggalakkan partisipasi seluruh potensi swadaya masyarakat yang dapat melibatkan seluruh komponen yang ada dalam usaha mensejahterakan masyarakat;
4. Sebagai upaya perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat.

c. Tujuan dibentuknya lembaga kemasyarakatan adalah :

1. Tercapai dan terpeliharanya nilai-nilai kehidupan masyarakat Nagari yang berasaskan gotong royong dan kekeluargaan;
2. Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Nagari yang berdayaguna dan berhasilguna;
3. Terwujudnya kesejahteraan masyarakat atas dasar dukungan seluruh potensi swadaya masyarakat;
4. Terwujudnya keberhasilan pelaksanaan pembangunan dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat.

d. Tugas Dan Fungsi

Lembaga Kemasyarakatan Nagari mempunyai tugas membantu Pemerintah Nagari dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat Nagari. Tugas Lembaga Kemasyarakatan Nagari meliputi :

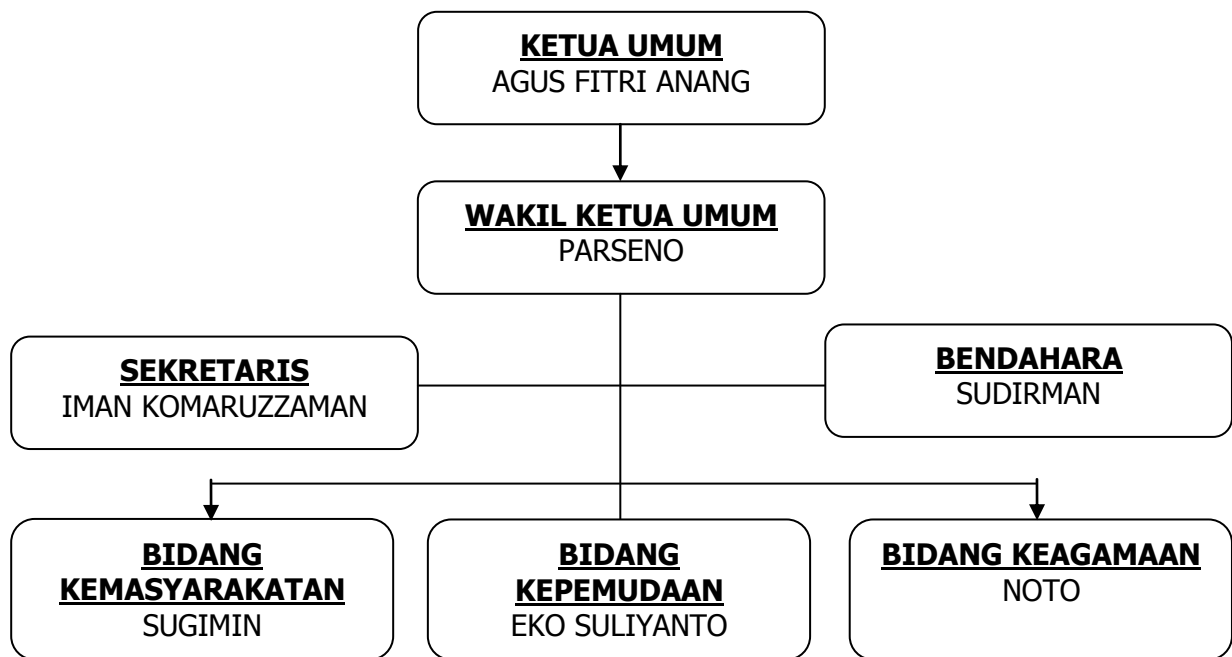
1. Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif dengan mengakomodir kebutuhan masyarakat menyelesaikan permasalahan yang ada dan mengoptimalkan potensi yang ada;
2. Melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif;
3. Menggerakkan, memotivasi dan mengembangkan partisipasi, gotong- royong, dan swadaya masyarakat;
4. Menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di segala bidang ;

e. Lembaga Kemasyarakatan mempunyai fungsi :

1. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan.
2. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
4. Penyusunan rencana, pelaksana, pengendali, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;

5. Penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat;
6. Pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga;
7. Pemberdayaan hak politik masyarakat;
8. Pengembangan kreatifitas, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja; dan
9. Pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara Pemerintah Nagari dan masyarakat.

Tabel 11: Struktur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN)



Tabel 12: Struktur Organisasi Karang Taruna



5. PKK NAGARI LUNANG TIGA

5.1. Dasar Hukum

1. Kepmendagri No 53 Tahun 2000 tentang PKK
2. Permendagri No. 54 Tahun 2007 tentang Pokjanal Posyandu
3. Kesepakatan Bersama BKKBN dengan TP.PKK tentang Rencana Kegiatan Operasional Pelaksanaan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana Tahun 2015

5.2. VISI

Terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada tuhan yang maha esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju-mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.

5.3. MISI

1. Meningkatkan mental spiritual, perilaku hidup dengan menghayati dan mengamalkan pancasila serta meningkatkan pelaksanaan hak dan kewajiban sesuai dengan hak azasi manusia (HAM),demokrasi,meningkatkan kesetiakawanan sosial dan kegotong royongan serta pembentukan watak bangsa yang selaras, serasi dan seimbang.
2. Meningkatkan pendidikan dan ketrampilan yang diperlukan, dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa serta pendapatan keluarga.
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pangan keluarga, serta upaya peningkatan pemanfaatan pekarangan melalui halaman asri, teratur, indah dan nyaman (hatinya) PKK, sandang dan perumahan serta tata laksana rumah tangga yang sehat.
4. Meningkatkan derajat kesehatan, kelestarian lingkungan hidup serta membiasakan hidup berencana dalam semua aspek kehidupan dan perencanaan ekonomi keluarga dengan membiasakan menabung.
5. Meningkatkan pengelolaan gerakan PKK baik kegiatan pengorganisasian maupun pelaksanaan program-programnya yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat setempat.

5.4.Tujuan

Gerakan PKK Bertujuan memberdayakan keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.

5.5. 10 Program Pokok PKK

1. Penghayatan dan Pengamalan Pacasila
2. Gotong royong
3. Pangan
4. Sandang
5. Perumahan dan Tata laksana Rumah Tangga
6. Pendidikan daan ketrampilan
7. Kesehatan
8. Pengembangan Kehidupan Berkoperasi
9. Kelestarian Lingkungan hidup
- 10.Perencanaan sehat

Pokja I Penghayatan dan Pengamalan Pacasila
Gotong royong

Pokja II Pendidikan daan ketrampilan
Pengembangan Kehidupan Berkoperasi

Pokja III Pangan
Sandang
Perumahan dan Tata laksana Rumah Tangga

Pokja IV Kesehatan
Kelestarian Lingkungan hidup
Perencanaan sehat

Tabel 13: Struktur PKK Nagari



2.4. Dinamika Konflik

Dinamika konflik merupakan gambaran menyeluruh tentang keadaan, pola intensitas dan karakter nagari meliputi kekuatan hubungan antar pemangku kepentingan di nagari yang berpengaruh terhadap pencapaian tujuan pembangunan dan upaya bina damai. Kajian dinamika konflik adalah serangkaian kegiatan pengumpulan, pengolahan dan formulasi data keadaan nagari yang meliputi pemahaman konteks, interaksi, intervensi, pelaku, masalah dalam rangka perencanaan pembangunan bina damai.

Kajian terhadap dinamika konflik dalam penyusunan RPJM Nagari dimaksudkan untuk menggambarkan secara keseluruhan tentang pola kekuatan hubungan antar kelompok, kerentanan sosial, kohesivitas kelompok, serta factor - faktor pendorong dan penghambat perdamaian di nagari sebagai masukan dalam merumuskan kebijakan dan startegi pembangunan.

Secara khusus kajian dinamika konflik ini bertujuan :

- Mengidentifikasi kekuatan hubungan antar pemangku kepentingan yang terlibat dalam pembangunan di nagari.
- Mengidentifikasi kondisi sosial yang menyebabkan kesenjangan diantara kelompok antar pemangku kepentingan di nagari
- Mengidentifikasi factor - faktor pendorong dan pemecah perdamaian dalam masyarakat; dan

- d. Merumuskan strategi penanganan dan pencegahan konflik serta bina damai ke depan secara terpadu.

Tabel berikut ini menunjukkan analisa kerentanan terjadinya konflik kelembagaan jika tidak memahami mengenai TUPOKSI dari masing – masing lembaga yang ada di nagari lunang tiga.

Tabel 14. Peranan Lembaga Masyarakat Nagari Lunang Tiga.

No	Lembaga	Peran
1	BAMUS	Sebagai lembaga yang menerima aspirasi masyarakat dan menindaklanjuti dalam melakukan tugasnya sebagai fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran.
2	LPMN	Merupakan wadah penggalian gagasan masyarakat
3	Sekolah/Lembaga Pendidikan	Di Nagari Lunang Tiga memiliki peran sangat penting sebagai sarana pendidikan, ini bisa dilihat dengan jumlah PAUD 2, TPA 3, SD 1, MI 1, SMP sebanyak 1.
4	KAMPUNG	Kepala kampung sebagai lembaga yang merealisasikan segala keputusan wali nagari, dan mengatur masyarakat di tingkat bawah
5	Kelompok tani	Untuk lebih mengoptimalkan Potensi pertanian/perkebunan yang ada di nagari
6	Poskesri	Sebagai sarana dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
7	Pustu	Pustu membantu muskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat
8	PKK	Mengupayakan kegiatan-kegiatan pemberdayaan keluarga seperti Tanaman Obat Keluarga
9	Majelis Ta'lim	Wadah pembinaan dan pendalaman keagamaan khususnya kepada ibu-ibu.
10	RT	Sebagai lembaga non struktur namun memiliki peranan penting dalam perjalanan pemerintahan nagari lunang tiga
11	Koperasi/SPP/UEP	Lembaga yang menangani masalah ekonomi masyarakat dalam lingkup nagari lunang tiga
12	Karang Taruna	Karang Taruna sebagai wadah perhimpunan pemuda dalam melakukan kegiatan-kegiatan kepemudaan, olahraga sosial kemasyarakatan.

Tabel 16, Hasil Kajian Dinamika Konflik dan Tindakan Pemecahan Masalahnya.

No.	Masalah	Penyebab	Potensi	Alternatif Tindakan Pemecahan Masalah	Tindakan yang Layak
1	Terbatasnya sarana produksi dan modal	• Jauhnya Jangkauan untuk memperoleh Modal (Bank, BPR-LKP dll) • Syarat yang ditetapkan oleh Bank cukup Berat • Adanya Jaminan berupa sertifikat • Belum adanya Koperasi yang mandiri dan aktif	❖ Program SPP BPR, BRI & BPD ❖ Bumrag ❖ Distributor	➤ Bantuan Modal Usaha RTM ➤ Bantuan Modal Usaha SPP dan UEP ➤ Pendampingan Kelompok ➤ Bantuan Bibit Kelapa, sayur mayur ➤ Pengadaan Bibit Jagung ➤ Pengadaan pupuk bersubsidi. ➤ Pengadaan Obat - obat Pertanian ➤ Pengadaan Bibit Sapi & Induk Sapi	➤ Bantuan Modal Usaha RTM ➤ Bantuan Modal Usaha SPP dan UEP ➤ Pendampingan Kelompok ➤ Bantuan Bibit Kelapa, sayur mayur ➤ Pengadaan Bibit Jagung ➤ Pengadaan pupuk bersubsidi. ➤ Pengadaan Obat - obat Pertanian ➤ Pengadaan Bibit Sapi & Induk Sapi
2	Hasil Produksi Perkebunan Tidak Maksimal	• Langkanya pupuk bersubsidi • Mahalnya harga pupuk subsidi • Pelepasan Liar ternak	❖ PPL ❖ Petani ❖ Lahan perkebunan	➤ BUMNAG ➤ Mengoptimalkan Peraturan Daerah Tentang Ternak	➤ BUMNAG ➤ Mengoptimalkan Peraturan Daerah Tentang Ternak

3	Terbatasnya sarana pengolahan hasil produksi dan harga di tentukan oleh pengusaha	• Kurangnya Modal • Belum adanya talangan Modal dari Pemerintah untuk menstabilkan harga • Harga Standar hasil produksi perkebunan tidak jelas	❖ BUMNAG ❖ DISTRIBUTOR	➤ Pengadaan Mesin pengolahan TBS Skala Kecil ➤ Pelatihan Pengolahan Hasil Produksi	➤ Pengadaan Mesin pengolahan TBS Skala Kecil ➤ Pelatihan Pengolahan Hasil Produksi
4	Terbatasnya kemampuan petani untuk mengolah hasil yang memberikan nilai tambah.	• Kurangnya Kapasitas yang dimiliki oleh masyarakat • Pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh berbagai pihak belum menyentuh kebutuhan masyarakat sebenarnya. • Pelatihan yang pernah dilakukan belum dapat mengakomodir semua kebutuhan masyarakat,	❖ PPL ❖ PETANI ❖ Hasil Perkebunan ❖ Lokasi	➤ Pelatihan Pengolahan Hasil Produksi ➤ Pembuatan kawasan perdesaan yang implementasi ternak.	➤ Pelatihan Pengolahan Hasil Produksi ➤ Pembuatan kawasan perdesaan yang implementasi ternak.
5	Sering terjadi wabah penyakit malaria dan muntaber, DBD	• Kurangnya kesadaran masyarakat memanfaatkan/ memelihara prasarana kesehatan lingkungan • Masih terjadi B.A.B di sembarang tempat	❖ Pustu & Poskesri ❖ Tenaga medis ❖ Kelambunisasi ❖ Obat-obatan ❖ pengasapan	➤ Pengadaan peralatan POSYANDU ➤ Kelambunisasi ➤ Penyamprotan Nyamuk DBD ➤ Sosialisasi kehatan & KB ➤ Pengadaan Obat-obatan gratis	➤ Pengadaan peralatan POSYANDU ➤ Kelambunisasi ➤ Penyamprotan Nyamuk DBD ➤ Sosialisasi kehatan & KB

				➤ Pembangunan MCK	➤ Pengadaan Obat-obatan gratis ➤ Pembangunan MCK
7	Harga kebutuhan pokok tidak stabil	• Rusaknya Jalur Transportasi sehingga arus keluar masuk barang dan jasa terhambat • Kurang maksimalnya pasar nagari	❖ Raskin ❖ TOSERBA ❖ BUMNAG	➤ Sembako Murah ➤ Raskin	➤ Sembako Murah ➤ Raskin
8	Terbatasnya penyediaan air bersih pada musim kemarau	• Debit dan Sumber Mata Air semakin berkurang • Jaringan Perpipaan yang ada banyak yang belum dapat diakses sepenuhnya oleh masyarakat • Mata air & PMA belum dimanfaatkan secara maksimal	❖ Sumur gali ❖ Sungai ❖ Perpipaan	➤ Perluasan Perpipaan Air Bersih ➤ Penggalian Sumur Bor ➤ Pembuatan Sumur Gali ➤ Pengadaan Penunjang Perpipaan Air Bersih	➤ Perluasan Perpipaan Air Bersih ➤ Penggalian Sumur Bor ➤ Pembuatan Sumur Gali ➤ Pengadaan Penunjang Perpipaan Air Bersih
9	Masih adanya angka pengangguran dan masyarakat penyandang	• Kurangnya Lapangan kerja • Kurangnya Keterampilan • Tidak ada modal usaha • Kurangnya Informasi lowongan kerja yang layak	❖ Padat Karya ❖ Dana Desa ❖ Proyek-Proyek Pemerintah	➤ Pelatihan Keterampilan ➤ Pelatihan Perbengkelan ➤ Dukungan Kegiatan Sunatan Massal & Akte Nikah Massal	➤ Pelatihan Keterampilan Menjahit ➤ Pelatihan Perbengkelan

	Penyakit kesejahteraan sosial	• Minimnya Upah • Kenaikan harga barang dan jasa			
10	Masih adanya Prasarana Transportasi yang kurang memadai	• Jalan kabupaten rusak sepanjang $\pm$ 4.000 m • Jalan Kabupaten sepanjang 4.000 m tergerus air • Jembatan jalan kabupaten sudah tidak layak • Jalan usaha tani belum memadai • Jalan kampung dan lingkungan belum di aspal • Belum adanya transportasi ambulan nagari	➤ Swadaya ➤ Sarana transportasi ➤ Pasir ➤ Krikil ➤ Batu kali ➤ Hasil perkebunan ➤ Anak sekolah ➤ Buruh pasar & bangunan	➤ Pembangunan Jalan Ekonomi ➤ Pembangunan Jalan Lingkungan ➤ Pengaspalan jalan lingkungan ➤ Pembangunan/ perehapan Jembatan ➤ Peningkatan jalan usaha tani ➤ Pembuatan TPT Jalan Lingkungan ➤ Pembangunan Saluran Drainase ➤ Pembangunan bronjong	➤ Pembangunan Jalan Ekonomi ➤ Pembangunan Jalan Lingkungan ➤ Pengaspalan jalan lingkungan ➤ Pembangunan/ perehapan Jembatan ➤ Peningkatan jalan usaha tani ➤ Pembuatan TPT Jalan Lingkungan ➤ Pembangunan Saluran Drainase ➤ Pembangunan bronjong

11	Masih ada balita BGM / gizi buruk	• Kurangnya Asupan Gizi • Kurang Faham tentang pentingnya Posyandu • Kurangnya anggaran PMT • Pelatihan kader posyandu	➤ Posyandu ➤ PMT ➤ Kader posyandu ➤ Para medis ➤ Balita ➤ Bumil	➤ Pemberian Makanan Tambahan Bagi Siswa TK/SD ➤ Kegiatan Lomba Makan sehat ➤ Kegiatan lomba Balita Sehat ➤ Pemberian obat – obatan dan Vitamin	➤ Pemberian Makanan Tambahan Bagi Siswa TK/SD ➤ Kegiatan Lomba Makan sehat ➤ Kegiatan lomba Balita Sehat ➤ Pemberian obat – obatan dan Vitamin
12	Masih ada masyarakat miskin dan tinggal dirumah tidak layak huni (kumuh)	• Tidak adanya biaya untuk Pembangunan Rumah • Kurangnya Keterampilan • Tidak ada modal usaha • Kurangnya Informasi lowongan kerja • Minimnya Upah • Kenaikan harga barang dan jasa	➤ BPJS ➤ Raskin ➤ Rumah ➤ Dana Sosial	➤ Rehabilitasi RTLH ➤ Bedah Rumah ➤ Santunan Bagi Lansia dan Jompo ➤ Santunan Bagi Yatim Piatu ➤ Bantuan Bencana Alam	➤ Rehabilitasi RTLH ➤ Bedah Rumah ➤ Santunan Bagi Lansia dan Jompo ➤ Santunan Bagi Yatim Piatu ➤ Bantuan Bencana Alam
13	Masih ada angka buta aksara dan masih adanya drop/out	• Masyarakat usia 40 Tahun keatas banyak yang tidak pernah sekolah • Rendahnya Kualitas Ekonomi	➤ Gedung SD ➤ Tenaga guru ➤ Majelis ta'lim ➤ Toga & tomas	➤ Program KF ➤ Paket A, B dan C ➤ Pembentukan PKBM ➤ Penyuluhan kepada Orang Tua	➤ Program KF ➤ Paket A, B dan C ➤ Pembentukan PKBM ➤ Penyuluhan kepada

		• Kurangnya Motivasi Orang Tua terhadap pendidikan anaknya • Kurangnya perhatian orang tua terhadap pergaulan anaknya			Orang Tua
14	Konflik antar keluarga/warga	• Sengketa Tanah Warisan • Kebanyakan Masyarakat kurang Peduli terhadap legalitas kepemilikan hak atas tanah • Banyak masyarakat yang tidak memiliki bukti kepemilikan hak (Surat Jual Beli, Hibah, Akte) • Hasil kesepakatan pembagian hak sering diabaikan karena tidak memiliki bukti tertulis • Kebanyakan masyarakat kurang pentingnya surat izin hiburan malam pada acara adat (Resepsi pernikahan) • Kurangnya Sosialisasi mengenai Hukum	➤ Babinkamtibmas ➤ Pemnag ➤ BAMUS ➤ LPMN ➤ TOGA & TOMAS	➤ Sertifikasi Lahan Masyarakat ➤ Sosialisasi Kadarkum ➤ Sosialisasi perlindungan anak dan Perempuan	➤ Sertifikasi Lahan Masyarakat ➤ Sosialisasi Kadarkum ➤ Sosialisasi perlindungan anak dan Perempuan

15	Sarana dan prasarana pelayanan Publik masih belum memadai & Fasilitas kantor nagari belum lengkap	• Seringnya pemadaman lampu di siang hari • Sering rusaknya peralatan penunjang pelayanan masyarakat • Minimnya Biaya Operasional • Aula pertemuan Kurang luas • Belum lengkapnya gerbang batas nagari & kampung • Belum adanya Sekretariat BAMUS, LPMN, PKK, Karang Taruna	➤ Lahan ➤ Swadaya	➤ Pengadaan Laptop/Printer ➤ Pengadaan Kursi Rapat & Kursi tamu ➤ Pengadaan Papan data ➤ Pengadaan Cat tembok ➤ Pembuatan Taman kantor ➤ Pemasangan eenergi terbaru ➤ Perluasan Aula Kantor Nagari ➤ Pembuatan Kantor/Sekretariat Lembaga Nagari	➤ Pengadaan Laptop/Printer ➤ Pengadaan Kursi Rapat & Kursi tamu ➤ Pengadaan Papan data ➤ Pengadaan Cat tembok ➤ Pembuatan Taman kantor ➤ Pemasangan eenergi terbaru ➤ Perluasan Aula Kantor Nagari ➤ Pembuatan Kantor/Sekretariat Lembaga Nagari
----	---	--	--	---	---

2.5. MASALAH DAN POTENSI

1. MASALAH

Daftar peta permasalahan ini didapat dari hasil musrenbangnag penyusunan RPJM Nagari Lunang Tiga yang menghadirkan masing - masing perwakilan Kampung yang berkompeten dan mewakili unsur - unsur yang ada di dalamnya dengan menggunakan alat kaji Profil Nagari, Diagram Venn Hubungan Kelembagaan serta Kalender Musim. Sebagai data tambahan, upaya observasi dan wawancara dengan para pihak terkait juga dilakukan, sehingga dimungkinkan tidak ada masalah, potensi dan usulan perencanaan pembangunan nagari yang terlewatkan/tidak terakomodasi.

Semua pandangan yang muncul diinventarisir, dicoding, dan diskoring untuk kemudian diurutkan berdasarkan nilai permasalahan yang mendapat skoring terbanyak di masing-masing bidang. Karena begitu banyaknya masalah yang masuk maka diupayakan reduksi data, sehingga masalah di sini benar - benar masalah pokok dan penting. Di bawah ini adalah daftar masalah yang secara kualitatif dirasakan oleh masyarakat di masing - masing Kampung. Berikut ini tabel menunjukkan permasalahan Hasil MUSRENBANGNAG Nagari Lunang Tiga.

1. Bidang Pendidikan.

Dalam bidang pendidikan nagari lunang tiga boleh di bilang agak ketinggalan. Karena masih banyak rasio warga yang masih hanya tamatan SMP. Namun banyak warga yang beralasan karena tidak mempunyai biaya, untuk menyekolahkan anak - anaknya dijenjang pendidikan tingkat atas sangat tidak mungkin, mengingat kondisi ekonomi yang pas - pasan, dan banyaknya anak – anak usia sekolah yang sudah tergiur dengan pekerjaan di perusahaan apalagi di nagari lunang tiga tidak tersedia sekolah lanjutan tingkat atas. Berikut ini tabel masalah yang timbul dari bidang pendidikan.

Tabel 17. Bidang Pendidikan

No	Bidang	Masalah
1	Pendidikan	1. Sarana dan prasarana PAUD tidak memadai dan perlu pengembangan 2. Rendah/kurangnya kesadaran pendidikan non formal dan usia dini, baik umum maupun keagamaan di kalangan warga

		3. TPA yang membutuhkan renovasi dan pengembangan/pembuatan MDA. 4. SD,MI dan SMP butuh insfrastruktur Tambahan. 5. Pembuatan sekolah menengah kejuruan
--	--	---

2. Bidang Kesehatan.

Masalah kesehatan yang sangat dirasakan oleh warga masyarakat nagari luang tiga adalah masih kurangnya pelayanan tenaga medis yang ada di nagari, jauhnya pelayanan rujukan dan belum tersedianya sarana transportasi guna mengantar warga yang sakit. Masalah yang timbul dari bidang kesehatan ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Tabel 18. Bidang Kesehatan

No	Bidang	Masalah
1	Kesehatan	1. Kurangnya kesediaan air bersih, terutama di musim kemarau 2. Kurangnya kesadaran warga untuk hidup bersih dan sehat 3. Ketersediaan sarana prasarana dan operasional posyandu yang masih kurang 4. Tidak adanya sarana transportasi pasien rujukan 5. Pengadaan peralatan tambahan guna menunjang pelayanan POSYANDU. 6. Perlu adanya sosialisasi tentang kesehatan dan bahaya penyakit.

3. Bidang Lingkungan Hidup

Masalah yang dihadapi di nagari lunang tiga dari segi lingkungan hidup selama ini banyak masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan dan belum tertatanya keasrian nagari. Masalah yang timbul dari bidang lingkungan hidup di tunjukkan pada tabel berikut ini.

Tabel 19 Bidang Lingkungan Hidup

No	Bidang	Masalah
1	Lingkungan Hidup	1. Kurangnya kesadaran Hidup bersih. 2. Banyaknya warga yang buang sampah sembarangan 3. Belum adanya taman Nagari terbuka Hijau 4. Gersangnya jalan poros nagari

		5. Banyaknya batang pohon di sepanjang jalan 6. Belum adanya kesadaran masyarakat bahaya nya membuang sampah ke sungai.
--	--	--

4. Bidang Sarana dan Prasarana

Masalah yang di hadapi oleh nagari lunang tiga dalam bidang sarana prasarana masyarakat rata – rata pada kegiatan pembangunan dan perawatan jalan usaha tani. Tabel berikut ini menunjukkan masalah dalam bidang sarana prasarana.

Tabel 20, Bidang Sarana Prasarana

No	Bidang	Masalah
1	Sarana Prasarana	1. Banyaknya jalan usaha tani yang belum layak 2. Jalan lingkungan atau jalan kampung musim hujan becek 3. Terjadinya penyempitan badan jalan 4. Gelapnya jalan lingkungan di malam hari 5. Jalan poros kabupaten rusak 6. Tidak adanya solusi penanganan banjir musiman.

5. Bidang Politik, Sosial, dan Budaya

Dalam bidang ini, tingkat sosial warga Nagari Lunang Tiga tidak lepas dari masalah-masalah yang dihadapi oleh warga, antara lain masih banyak warga yang belum paham tentang program pemerintah, baik program kerja maupun program lainnya, dan masih ada warga yang masih belum bisa menerima keputusan bersama (mempertahankan ide sendiri) hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran dan ilmu sehingga menyebabkan tingkat sosial budayanya rendah. Tabel berikut ini menjelaskan adanya masalah di bidang Politik, Sosial, Budaya.

Tabel 21, Bidang Politik, Sosial, dan Budaya

No	Bidang	Masalah
1	Politik, Sosial, dan Budaya	1. Pengangguran tinggi 2. Alat transportasi terbatas 3. Masih sulitnya mengumpulkan masyarakat ketika melakukan pertemuan di kantor nagari 4. Tidak ada sarana mengaji untuk anak2 yang memadahi 5. Banyak warga menikah di usia muda/dibawah umur.

		6. Pendapatan Rumah Tangga rendah 7. Kelembagaan nagari belum berperan aktif 8. Sarana olah raga yang terbatas 9. Kesenian tradisional belum berkembang/dilestarikan secara maksimal 10. Masjid dan mushalla butuh perehapan 11. Belum adanya operasional majlis ta'lim 12. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang kadarkum
--	--	---

6. Bidang Ekonomi

Kehidupan warga Nagari Lunang Tiga selama ini bekerja perusahaan yang ada di wilayah kec. Lunang. Disamping pekerjaan harian masyarakat di perusahaan perlu adanya peningkatan ekonomi masyarakat dengan berbagai terobosan usaha yang bersifat rumahan. Tabel berikut ini akan menjelaskan masalah perekonomian masyarakat.

Tabel 22 Bidang Ekonomi

No	Bidang	Masalah
1	Ekonomi	1. Simpan pinjam belum menyentuh sesuai sasaran 2. UMKM dan UKM butuh modal usaha. 3. Belum maksimalnya pasar nagari 4. Belum adanya pelatihan tentang TTG/Posyantek 5. Belum adanya Pelatihan kelompok masyarakat

7. Pertanian/Perkebunan Perikanan dan peternakan

Dalam bidang Pertanian/perkebunan, Perikanan dan peternakan masyarakat nagari lunang tiga masih banyak yang kekurangan pengalaman bagaimana caranya memperoleh inovasi agar apa yang di hasilkan dari hasil perkebunan tersebut. Pada tabel berikut ini menunjukkan masalah di bidang Pertanian/Perkebunan Perikanan dan peternakan.

Tabel 23 Bidang Pertanian/Perkebunan Perikanan dan peternakan

No	Bidang	Masalah
6	Pertanian, Perikanan dan	1. Belum adanya budidaya ikan air tawar 2. Membutuhkan pengembangan dan pembinaan dibidang peternakan

	peternakan	3. Belum tersedianya kelompok ternak 4. Mahalnya harga pupuk subsidi 5. Belum pahamnya masyarakat tentang TTG 6. Belum pahamnya masyarakat terhadap tumpang sari perkebunan dan peternakan.
--	------------	--

8. Identifikasi Masalah Berdasarkan Bidang APBNagari.

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Lunang Tiga ada beberapa masalah dalam penganggaran dan realisasi seperti ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Tabel 24 Bidang dan Masalah

No	Bidang	Masalah
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	1. Kelengkapan peralatan dan administrasi nagari perlu adanya :Kelengkapan Peralatan Kantor/peralatan rumah tangga Nagari, Kelengkapan Peralatan dan Operasional Administrasi Nagari 2. Batas Nagari dan banyaknya Kampung di Nagari Lunang Tiga perlu adanya penetapan dan penegasan batas Nagari/Kampung; yaitu : gapuro batas Nagari/Kampung, 3. Perkembangan penduduk yang ada di Nagari Lunang Tiga, status kepemilikan tanah yang belum tersurat perlu adanya Pendataan Nagari yang akurat: profil Nagari, Data penduduk, Monografi Nagari, Fasilitasi Akte Kelahiran dan kematian, Pensertifikatan Tanah secara masal (prona) 4. Penyelenggaraan musyawarah nagari; yaitu : Musrenbangnag, Musnag, Muskam : banyak yang kurang peduli dengan undangan. 5. Pengelolaan informasi Nagari; yaitu : Pengelolaan SIN, sketsa nagari, peta nagari,

		kalender Musim, sarana informasi masyarakat. 6. Penyelenggaraan perencanaan Nagari; yaitu : RPJMNag, RKPNag, APBNag 7. Penyelenggaraan dan evaluasi tingkat perkembangan pembangunan pemerintahan Nagari; yaitu : LPPN, APBNag & LRA/Semester 8. Penyelenggaraan kerjasama antar Nagari; yaitu : Sarpras DAN SPP/UEP 9. Profesionalitas kerja Pelayanan Masyarakat yang masih kurang efektif dan efisien perlu adanya Peningkatan Administrasi Nagari: Kelengkapan Operasional Perkantoran, Peningkatan Pelayanan Masyarakat, SK lembaga Nagari (LPMN, PKK, Pokgiat LPMN, RT, Karangtaruna), Kelengkapan Administrasi RT dan peralatan RT, pembuatan Program sistem Informasi Nagari untuk pelayanan Masyarakat, pengadaan Mesin Absensi Vinger Print, 10. Peningkatan Keamanan : Poskamling, gardu Ronda, Alat Pemadam Kebakaran, Pembinaan LINMAS, Pemasangan Kamera CCTV di area kantor nagari 11. Peringatan hari Jadi nagari ; Penyelenggaraan Hari jadi nagari, Lomba RT, Lomba kampung, Ekspo nagari, Gelar seni Budaya nagari 12. Peningkatan Wawasan Kebangsaan : penyuluhan wawasan kebangsaan dan bela Negara
--	--	--

2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan	1. Banyak lokasi yang sering banjir, Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Nagari, yaitu : Pembuatan jembatan, pembangunan jalan (Cor Blok, Aspal), drainase, Saluran Irigasi , Pembangunan dan Perbaikan Pintu air, TPA (Sampah), Gorong-gorong, penerangan jalan, Rambu-rambu lalu Lintas, Meteran dan Instalasi Listrik bagi KK Miskin, Peninggian Bangket, Baliho Nagari 2. Penataan Tata Ruang Nagari dan Bangunan kantor Nagari yang sudah lama perlu adanya Pembangunan dan rehab sarana dan prasarana kantor Nagari; yaitu : Rehap Kantor Nagari dan bangunan Pendukung lainnya, pembangunan ruang hijau Nagari (Taman Nagari), 3. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan, yaitu : Poskesri, Pustu, Posyandu (Timbangan, Alat tensi), Alat Ukur (Diabetes, Kolesterol, Asam Urat), Jambanisasi, Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni, Lantenisasi, MCK Komunal 4. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Penunjang Pengembangan Ekonomi Produktif : Pembangunan gedung BUMNag, Pembangunan Kios Nagari, Pembangunan WILKEL, 5. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan, yaitu : TK, PAUD, TPQ, Honor Guru Paud dan TK
---	--------------------------------	---

		6. Pembangunan Tata Lingkungan peningkatan Kebersihan dan kesehatan masyarakat : pembangunan Kandang kelompok, Sanitasi, IPAL komunal, MCK Komunal, Peresapan Air Hujan, Pembangunan PAMSIMAS 7. Pelestarian lingkungan hidup, yaitu : penghijauan, pemanfaatan Lahan Pekarangan 8. Pengembangan Infrastruktur Pedukuhan : Pembangunan Balai Kampung, pembangunan Pagar Makam, Pengadaan Peralatan Perawatan Jenazah, Papan Nama (RT), papan Pengumuman, Papan Koran, Pembangunan Kamar Kereta Jenazah, Balai makam, Pembangunan Tiang Bendera dan Tugu Projo Taman Sari, Papan Nama Jalan/Gang, Sumur Makam, Pembangunan Menara Masjid, Pengadaan Sound System Pedukuhan, Pengadaan Genset, Pengadaan Tratak, Taman Kampung 9. Peningkatan Peribadahan Masyarakat : rehap Masjid, pembangunan Bangunan Pendukung Masjid 10. Penggantian Lahan/Sawah kas yang digunakan untuk fasilitas pendidikan/umum
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	1. Pembinaan Kesehatan Masyarakat : Pembinaan POSYANDU BALITA dan LANSIA, PHBS, PSN, Senam Lansia, Senam Kesehatan Jasmani, Gebyar Senam Sehat, Hatinya PKK, Penyuluhan Bahaya NAPSA, Deklarasi Stop BABS, Pengadaan Ambulan Nagari, STBM

		2. Pembinaan lembaga kemasyarakatan; yaitu : RT, BAMUS, LPMN, PKK, Pokgot dan karang taruna 3. Pembinaan ketentraman, ketertiban, dan Kesejahteraan masyarakat; yaitu : siskamling, pembinaan keluarga Sejahtera, 4. Pembinaan kerukunan umat beragama; yaitu : PHBA, Pembinaan kaum Rois dan Pengadaan Alat Pengurusan jenazah (Kereta Jenazah), penyuluhan Masuknya Aliran sesat 5. Pengadaan sarana dan prasarana olah raga; yaitu : lapangan olahraga dan bangunan pendukung lapangan nagari 6. Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat; yaitu : Pengadaan gamelan kelompok Karawitan, sragam kesenian (kelompok Ketoprak, Kelompok Karawitan) 7. Peningkatan Kapasitas SDM : Out Bond, Kunjungan Karang taruna, Pembinaan kerja ke Luar Negeri,
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	1. Pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan; yaitu : Gapoktan, UMKM, Pelatihan Kerajinan barang bekas, Kopwan dan Puap, Pelatihan memasak KWT/PKK, Pelatihan BUMNag, Pelatihan Pembuatan Tempe/Emping Melinjo, Pelatihan pembuatan telur Asin, pelatihan pembuatan Tahu/Tempe, 2. Peningkatan kapasitas/ Ketrampilan masyarakat; yaitu : Pelatihan Montir, Pelatihan Bengkel (Las, AC, DII), Pelatihan menjahit, pelatihan Tukang, pelatihan Batik, Pelatihan

		Memasak 3. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana,: 4. Ekonomi Produktif : Modal BUMNag, Bantuan Modal UMKM, KUBE, 5. Peternakan ; Pembangunan Kandang Kelompok, pelatihan pembuatan Pakan Ternak 6. Perikanan : pembangunan dan Rehap Kolam Kelompok, Pelatihan Pembuatan pakan, pelatihan pembenihan. 7. Pelatihan teknologi tepat guna; yaitu : Bang Sampah, Pemanfaatan Lahan Pekarangan, BIOGAS, 8. Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi Wali Nagari, perangkat Nagari, dan Badan Pemusyawaratan Nagari; yaitu : Bimtek Pamong Nagari, Sosialisasi peyelenggaraan PemNagari, Kunjungan Kerja, Perpustakaan Nagari, 9. Pelatihan kesenian dan sosial budaya masyarakat; yaitu : Pelatihan karawitan, pelatihan MC Bahasa Jawa, pelatihan Sinoman, Pelatihan Mocopat 10. Peningkatan Gotong Royong Masyarakat ; Penyelenggaraan Bulan Bakti Gotong Royong, 11. Banyaknya kelompok-kelompok yang belum berbadan hukum; Fasilitasi legalitas kelompok
--	--	---

a. POTENSI

1. Sumber Daya Alam

Sumber daya alam yang terdapat di Nagari Lunang Tiga ialah tersedianya lahan perkebunan. Yang terletak di semua kampung yang ada di nagari lunang tiga.

2. Sumber Daya Manusia

Kalau dilihat secara rata - rata penduduk Nagari Lunang Tiga memang banyak yang masih tamat SD, namun untuk warga yang umur muda rata - rata tamat SMP, Dan sudah banyak juga yang tamatan SMA, Perguruan Tinggi. Hal ini juga merupakan tantangan dan sekaligus potensi yang besar untuk memajukan Nagari Lunang Tiga

3. Sumber Daya Ekonomi

Potensi ekonomi didominasi oleh hasil - hasil Perkebunan dan Peternakan Sapi, Kambing dan Unggas. Sebagian besar warga Nagari Lunang Tiga adalah Pekebun, hanya beberapa orang saja yang berprofesi sebagai, Tukang, PNS Dan lain-lain.

4. Sumber Daya Sosial

Kegiatan - kegiatan sosial masih berjalan dengan baik dan Nagari Lunang Tiga, seperti kegiatan Gotong royong, Wirit Yasin dan lainnya.

5. Sumber Daya Buatan

Ada beberapa potensi dibidang infrastuktur yang ada di Nagari Lunang Tiga, seperti jembatan ada yang masih layak, jalan desa juga sebagian masih layak pakai.

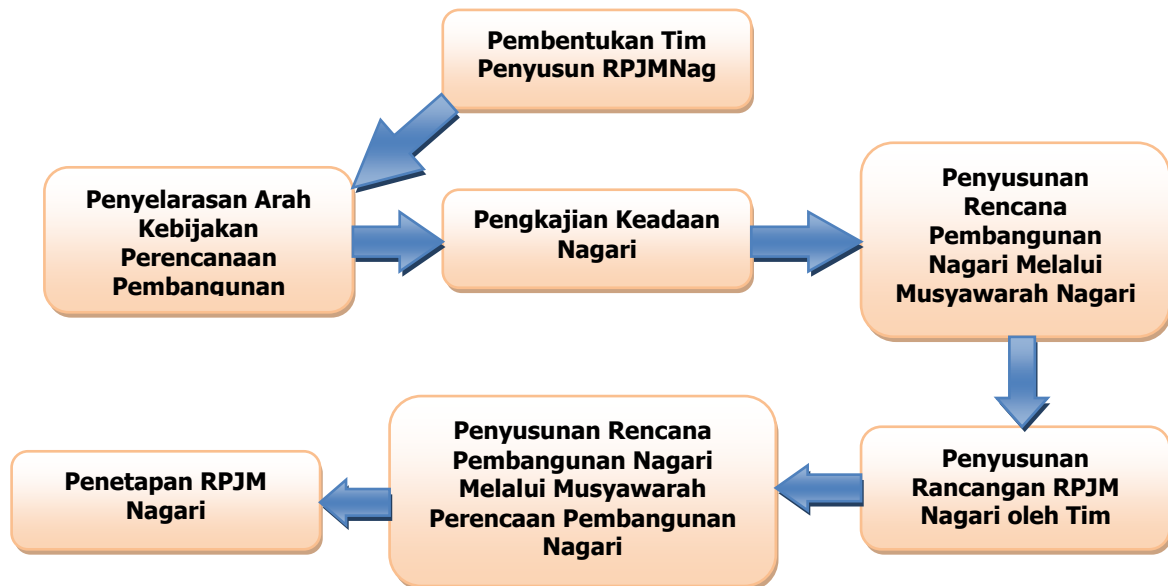
Dengan telah melakukan alur proses tahapan, penggalan dengan menggunakan Pentagonal aset, kalender musim, diagram venn, pemetaan dan Data Klarifikasi maka teridentifikasi beberapa pokok-pokok tantangan/masalah dan potensi yang sedang di hadapi oleh masyarakat/warga termasuk kelembagaan Nagari dan meliputi beberapa aspek. Dalam upaya mewujudkan visi misi, aspek potensi merupakan salah satu pendukung utama untuk menyelesaikan masalah. Berdasarkan hasil pengalian gagasan yang di laksanakan mulai dari tingkat Kampung sampai dengan Nagari, maka di peroleh gambaran tentang potensi yang ada di Nagari Lunang Tiga. Pada tabel berikut ini menjelaskan identifikasi antara masalah dan potensi nagari.

Tabel 25 Indikasi Potensi Nagari

No	Aspek	Potensi dalam Nagari	Potensi luar Nagari
1	<i>Ekonomi</i>	• Adanya lahan Perkebunan • Adanya petani • Adanya peternak • Adanya kelompok usaha potensial(kelompok tani,spp dll) • Adanya usaha yang di kembangkan • Adanya hasil-hasil perkebunan • Adanya sungai,mata air sumur bor • Adanya tenaga kerja. • Adanya pedagang • Adanya lembaga keuangan Nagari (BUMNAG) • Adanya usaha kios,toko	• Adanya dukungan dari DD • Adanya dana ADD • Adanya Dukungan dari pemerintah daerah • Adanya sumber dana • Adanya dukungan bahan alat dan tenaga. • Adanya Dana simpan pinjam
2	<i>Pendidikan</i>	• Fasilitas sekolah PAUD,SD/MI dan kemauan belajar anak-anak tinggi • Adanya siswa • Adanya tenaga pendidik/Guru • Memiliki komite sekolah • Masyarakat mau berswadaya • Adanya perpustakaan sekolah	• Adanya dukungan dari pemerintah • Adanya Program pemberdayaan • Dan program-program lain yang mendukung kegiatan pendidikan.
3	<i>Kesehatan</i>	• Tersedianya PUSTU, Bidan Nagari dan Poskesri • Kegiatan pelayanan di posyandu yg rutin dan tersdia petugas posyandu dan kader setiap kampung • Ada dukun Beranak • Adanya sumber air bersih/pepipaan	• Adanya dukungan program dari pemerintah daerah
4	<i>Sarana prasarana infrastruktur</i>	• Ke gotong royongan masyarakat tinggi • Keswadayaan masyarakat tinggi • Jalan usaha tani & jln lingkungan sudah di buka	• Adanya program pemerintah • Adanya DDS • Adanya sumber dana dan dukungan alat dan bahan dari pihak lain • Adanya Alokasi Dana Desa
5	<i>Sosbud</i>	• Ke gotong royongan & Keswadayaan masyarakat tinggi • Ada lembaga nagari dan aparat nagari • Ada tenaga kerja • Ketrampilan Masyarakat • Ada tempat ibadah • Ada lapangan olahraga • Ada listirk masuk desa,teknologi dan informasi	• Adanya dukungan dari pemerintah daerah/ADD. 1. Dukungan dari program-program lain 2. Adanya dana desa

BAB III

PROSES PENYUSUNAN RPJM NAGARI



3.1. Pengkajian Keadaan Nagari

Proses Penyusunan RPJM Nagari dimulai setelah Wali Nagari dilantik, yaitu pada tanggal 14 Mei 2018. Dalam proses penyusunan ini Wali Nagari setelah menerima Surat Edaran Bupati Pesisir Selatan Nomor : 410/591/SE/DPMDPPKB-PS/2018 yang disampaikan Kepada Camat se Kabupaten Pesisir Selatan tanggal 30 Juli 2018, agar kiranya dapat melakukan tahapan-tahapan perencanaan sebagaimana mestinya.

Terkait dengan Penyusunan RPJM Nagari yang sudah tersusun segera ditetapkan dengan Peraturan Nagari (PERNAG), untuk selanjutnya disesuaikan dengan Peraturan Menteri dalam negeri no 114 tahun 2014 tentang perencanaan pembangunan serta mengacu pada Permen Nomor 43 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri nomor 20 tahun 2018 tentang pedoman pengelolaan keuangan.

Penyusunan RPJM Nagari diselenggarakan dengan mengikutsertakan unsur masyarakat Nagari. Penyusunan RPJM Nagari dimaksud dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi objektif Nagari dan prioritas program dan kegiatan kabupaten/kota. Penyusunan RPJM Nagari sebagaimana dimaksud dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:

a. Tahapan Persiapan

Pada Tahapan Persiapan ini hal yang dilakukan bersama antara lain pembentukan tim penyusun RPJM Nagari, pembekalan Tim Pokja Nagari Perencanaan Partisipatif yang dilaksanakan melalui musyawarah Nagari yang dilakukan secara terbuka dan demokratis.

Setelah pembentukan Tim Penyusun RPJMNag, tim tersebut selanjutnya segera melakukan Penjaringan masalah yang dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat RT dan kampung. Dari kegiatan ini tim penyusun berhasil menghasilkan data dan informasi dari tingkat komunitas, selanjutnya Pokja Nagari menyelenggarakan Musyawarah untuk mengkompilasikan data hasil Penjaringan masalah.

b. Tahapan pengkajian keadaan Nagari;

Pengkajian Keadaan Nagari adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Nagari. Pada tahapan ini dilakukan Penjaringan masalah melalui Musyawarah. Pada tahap selanjutnya dari Musyawarah Perencanaan Partisipatif oleh Tim Perencanaan Partisipatif Hasil yang dicapai masih berupa draft Dokumen RPJM Nagari tahun 2018 – 2024, yang oleh Pokja Nagari kemudian dikonsultasikan kepada publik melalui MUSRENBANG Nagari untuk mendapatkan tanggapan / masukan dari masyarakat serta nara sumber, usulan atau masukan dari masyarakat yang disetujui oleh forum akan di tambahkan dalam Dokumen RPJM Nagari tahun 2018 – 2024,

Pelaksana proses penjaringan masalah terdiri dari para anggota Pokja Nagari, tokoh masyarakat, relawan dan unsur pemerintah Nagari serta BAMUS (daftar Personil terlampir). Dalam konteks ini, tim Perencanaan Partisipatif bertanggung jawab secara institusional kepada Pokja Nagari, dan kepada publik lewat mekanisme Musyawarah Nagari.

Pada tahapan ini dilakukan musyawarah Nagari. Teknik yang dilakukan adalah melakukan ekspose atas hasil rancangan konsep yang disusun oleh Tim Pokja Perencanaan Partisipatif di depan Pihak terkait yang lebih luas. Selanjutnya dilakukan Tahapan Final Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari dan Penyampaian Draft Penetapan RPJM Nagari kepada Wali Nagari.

Proses penjaringan masalah itu dilaksanakan dalam forum musyawarah kampung yang telah dilakukan pada :

1. Kampung Marga Mulya dan Tanjung Mulya, ditambah dari unsure PKK Nagari Lunang Tiga 01 September 2018 Aula Kantor Nagari
2. Kampung Ujung Jaya, 03 September 2018 gedung MIS

Dari hasil Musnag penjaringan masalah dan potensi di tingkat Kampung kemudian dituangkan bagian akhir dari Bab III Draft RPJM Nagari

Tahapan penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten/ kota, Pada tahapan ini dilakukan penggalian informasi tentang program dan kegiatan

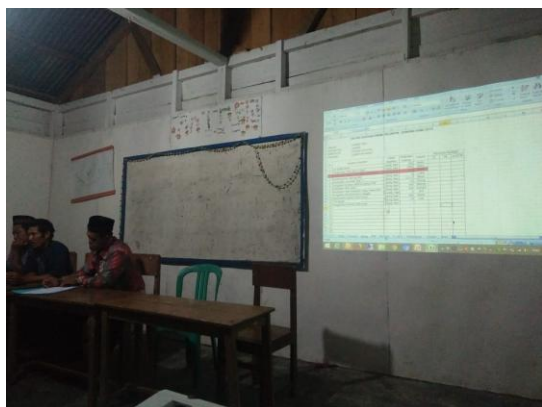
prioritas di tingkat Kabupaten, Provinsi dan Pusat untuk menjadi acuan bagi Nagari dalam menyusun Program dan Kegiatan selama 6 tahun.

2.2. Musyawarah Nagari RPJM Nagari.



Proses penyusunan program dan kegiatan dilakukan dalam Musyawarah ditingkat Nagari yang dilaksanakan tanggal 25 Agustus 2018 dengan tahapan sebagai berikut :

1. Mengkompilasikan dan Mengelompokkan Masalah - masalah dari hasil musyawarah tingkat kampung.
2. Menyusun Legenda dan Sejarah Nagari
3. Menyusun Visi Misi Nagari
4. Membuat skala prioritas. Pembuatan skala prioritas ini bertujuan untuk mendapatkan prioritas masalah yang harus segera dipecahkan. Adapun teknik yang digunakan adalah dengan menggunakan rangking dan pembobotan.
5. Menyusun alternatif tindakan pemecahan masalah,
6. Setelah semua masalah di rangking berdasarkan kriteria yang disepakati bersama, tahap selanjutnya adalah menyusun alternatif tindakan yang layak. Kegiatan ini mempunyai tujuan untuk mendapatkan alternatif tindakan pemecahan masalah dengan memperhatikan akar penyebab masalah dan potensi yang ada.-
7. Menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Periode tahun 2018 – 2024.





Dalam tahapan ini juga dipisahkan mana pembangunan skala Nagari dan pembangunan skala Kabupaten. Hasil yang dicapai dalam Musyawarah ini adalah tersusunnya draf RPJM Nagari. Setelah melewati Musrenbang Nagari dilakukan revisi untuk penyempurnaan draft. Draft RPJM Nagari yang sudah direvisi kemudian ditetapkan oleh Wali Nagari dan BAMUS menjadi Peraturan Nagari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM) Nagari Lunang Tiga Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan.

Tahapan terakhir adalah Sosialisasi RPJM Nagari, dilakukan di tiap Kampung dan RT melalui pertemuan-pertemuan rutin serta ditempelkan di papan informasi Nagari.

BAB IV

VISI, MISI, dan PROGRAM INDIKATIF (Enam Tahun)

4.1. VISI

Aparatur Nagari Lunang Tiga dan Masyarakat sepakat bahwa Visi adalah gambaran umum dari kondisi yang ideal yang dibutuhkan oleh Nagari Lunang Tiga di masa yang akan datang yang dicapai bersama dengan partisipasi masyarakat untuk jangka waktu tertentu.

Jangka waktu sebagaimana dimaksud sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pembangunan Desa, yaitu 6 (enam) tahun. Jangka waktu dimaksud bagi Nagari Lunang Tiga adalah dari Tahun 2018 sampai dengan 2024. Adapun sesuai kesepakatan antara Pemerintah Nagari Lunang Tiga dengan BAMUS Nagari Lunang Tiga bahwa visi Nagari Lunang Tiga adalah:

**“ TERBENTUKNYA PEMERINTAHAN NAGARI YANG BAIK DAN BERSIH GUNA
MEWUJUDKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT NAGARI YANG ADIL, DAMAI,
MAKMUR DAN SEJAHTERA”**

4.2. MISI

1. Melakukan Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintahan Nagari Guna Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat. Misi pertama ini memuat beberapa kata kunci yaitu :

- 1) Peningkatan kapasitas,

Peningkatan kapasitas yang dimaksud dalam misi ini adalah perbaikan tata kelola pemerintahan menuju aparatur yang bersih dan responsif dengan mengedepankan keterbukaan (transparansi) dalam berbagai bidang termasuk mengenai besaran anggaran pembangunan.

- 2) peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang dimaksud dalam misi ini adalah upaya pemerintahan daerah untuk pemenuhan hak-hak dasar masyarakat seperti kependudukan(akta kelahiran, KTP, KK), dan peningkatan pelayanan dibidang pendidikan dan kesehatan.

Capaian yang diharapkan dalam pelaksanaan misi ini adalah terciptanya sumberdaya manusia yang unggul, memiliki keterampilan dan berdaya saing tinggi. Dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas, pelayanan kesehatan menjadi faktor yang sangat penting. SDM berkualitas hanya dapat terbentuk dengan kondisi kesehatan prima. Kesehatan yang prima tentunya akan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk berbuat lebih banyak dan lebih produktif.

2. Meningkatkan Kualitas Pemahaman Masyarakat Tentang Agama Dan Kehidupan Bermasyarakat Yang Lebih Baik. Misi ini mengandung dua kata kunci yaitu :

- 1) mewujudkan pemahaman beragama

Yang dimaksud dengan kehidupan beragama yang rukun dan toleran dalam misi ini adalah adanya saling menghargai dalam hal membangun hubungan manusia dengan Allah SWT dan hubungan manusia dengan manusia.

- 2) mengembangkan nilai budaya bermasyarakat.

Yang dimaksud dengan nilai budaya ABS-SBK merupakan perwujudan ajaran Islam dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat berbangsa dan bernegara yang menjadi nilai substantif dalam pelaksanaan pembangunan. Nilai substantif tersebut yakni nilai *Kebenaran, Kejujuran, Keadilan* yang indikator pengamalannya terekam dalam Praktek Ibadah, Pola Pandang dan Karakter Masyarakatnya dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia

3. Menyelenggarakan Sistim Pemerintahan Yang Transparan, Akuntabel, Bisa Dipertanggungjawabkan Sesuai Dengan Peraturan Dan Perundang – Undangan. Transparan, Akuntabel, Bisa Dipertanggungjawabkan yang dimaksud dalam misi ini adalah perbaikan tata kelola pemerintahan menuju aparatur yang bersih dan responsif dengan mengedepankan keterbukaan (transparansi) dalam berbagai bidang termasuk mengenai besaran anggaran pembangunan.
4. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Melalui Program Pelatihan, Penyuluhan Dan Permodalan. Pada misi ini terdapat tiga kata kunci yaitu program pelatihan, penyuluhan atau sosialisasi dan permodalan. Program

pelatihan yang dimaksud dalam misi ini adalah pembelajaran kepada kelompok masyarakat mengenai usaha peningkatan perekonomian skala rumah tangga. Penyuluhan atau sosialisasi yang di maksud dalam misi ini adalah pembekalan dan pendampingan langsung pada pelaku unit usaha skala rumahan UMKM. Permodalan yang di maksud dalam misi ini adalah dukungan permodalan bagi kelompok masyarakat yang memiliki usaha kecil dan menengah yang berskala rumahan.

5. Menciptakan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Peningkatan Sarana Dan Prasarana. Perencanaan yang baik disusun berbasis data/informasi tolak ukur yang jelas dan riil. Data / informasi yang riil dimaksud adalah data profil desa. Informasi profil yang salah akan menyesatkan pikiran pengambil keputusan dalam perencanaan kebijakan. Artinya data yang salah akan menghasilkan perencanaan yang salah. Perencanaan yang salah sama artinya merencanakan kesalahan. Kesalahan dalam merencanakan dan melaksanakan kebijakan pembangunan merupakan indikator tata pemerintahan yang kurang baik. Oleh sebab itu diyakini “good village governance” tidak mungkin terwujud jika fondasi pembangunan yaitu pengelolaan data/informasi dan perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan tidak akuntabel. (tidak bisa dipertanggungjawabkan).
6. Mendorong Peningkatan Pendidikan Formal Dan Non Formal Guna Melahirkan Generasi Muda Yang Berguna Bagi Nusa, Bangsa Dan Agama. Mengutamakan program atau kegiatan yang mengarah pada peningkatan kualitas generasi muda dan mendukung segala kegiatan yang berhubungan dengan keagamaan, guna mencegah timbulnya penyakit masyarakat yang sama – sama kita tahu penyakit tersebut bias hilang kalau dari generasi mudanya sudah di didik pengetahuan yang mengarah pada kegiatan yang positif.

Tabel dibawah ini menunjukkan keterkaitan antara Visi Misi Tujuan dan Sasaran, dari pemerintah nagari lunang tiga untuk kurun waktu 6 tahun kedepan.

Visi : TERBENTUKNYA TATAKELOLA PEMERINTAHAN NAGARI YANG BAIK DAN BERSIH GUNA MEWUJUDKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT NAGARI YANG ADIL, DAMAI, MAKMUR DAN SEJAHTERA

Tabel 26 Misi Nagari Lunang Tiga

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>) berdasarkan demokratisasi, transparansi, penegakan hukum, berkeadilan, kesetaraan gender dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat.	1. Meningkatkan pelayanan bidang pemerintahan kepada masyarakat	a. Meningkatnya penataan administrasi kependudukan. b. Meningkatnya pencapaian kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, kualitas perlindungan anak dan pelayanan program keluarga berencana. c. Meningkatnya aktifitas pembinaan pendidikan politik masyarakat. d. Dalam perencanaan pembangunan desa diberbagai aspek dengan mempertimbangkan kesetaraan gender.	1) Meningkatkan kualitas SDM aparatur pemerintah nagari dan etos kerja birokrasi. 2) Meningkatkan kesempatan dan peran serta secara aktif pengawasan masyarakat (<i>control public</i>). 3) Meningkatkan transparansi, partisipasi dan akuntabilitas perencanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan termasuk keuangan nagari.	a) Meningkatkan kualitas SDM aparatur pemerintahan nagari sesuai kompetensi yang dibutuhkan. b) Meningkatkan transparansi, partisipasi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari. c) Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa d) Meningkatkan pelayanan kualitas pelayanan publik di berbagai bidang pelayanan e) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan nagari yang demokratis f) Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan
	2. Meningkatkan kualitas demokratisasi di Nagari	a. Meningkatnya iklim politik yang kondusif bagi berkembangnya kualitas kebebasan sipil dan hak-hak politik yang semakin seimbang dengan peningkatan		

		kepatuhan hukum. b. Meningkatkan keberhasilan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan Wali Nagari yang demokratis, rahasia dengan tingkat partisipasi optimal.		
	3. Meningkatkan transparansi dan rasa keadilan serta ketertiban masyarakat	a. Meningkatnya layanan informasi dan komunikasi. b. Meningkatnya kepatuhan semua pihak terhadap tegaknya hukum yang berlaku. c. Meningkatkan kepercayaan dan penghormatan public kepada aparatur pemerintahan Nagari.		
2. Meningkatkan pembangunan di bidang pendidikan agama dan umum untuk mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia agar memiliki kecerdasan dan daya saing yang lebih baik.	1. Meningkatkan taraf pendidikan masyarakat	a. Meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk berusia 15 tahun ke atas. b. Menurunnya angka buta aksara penduduk berusia 15 tahun ke atas. c. Meningkatnya APM dan APK pendidikan SD sampai dengan SLTA.	1. Meningkatkan fasilitas bantuan operasional satuan pendidikan yang ada di desa. 2. Meningkatkan fasilitas bantuan operasional di bidang pendidikan, pembinaan pemuda dan olahraga.	a. Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan di semua jenjang pendidikan. b. Meningkatkan kualitas proses pendidikan dan produk lulusan pendidikan. c. Meningkatkan partisipasi dan peranserta aktif masyarakat dalam bidang pendidikan,

				pembinaan pemuda dan olahraga.
	2. Meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan	a. Meningkatnya tingkat pekerja lulusan pendidikan kejuruan.		
	3. Meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda di berbagai bidang pembangunan	a. Meningkatnya revitalisasi organisasi kepemudaan (karang taruna). b. Meningkatnya penguasaan teknologi, jiwa kewirausahaan dan kreativitas pemuda.		
	4. Meningkatkan budaya dan prestasi pada masyarakat	a. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan. b. Meningkatnya prestasi pemuda di semua tingkatan.		
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang mendukung perekonomian nagari, seperti jalan, jembatan serta infrastruktur strategis lainnya.	1. Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana perekonomian nagari	a. Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana transportasi; b. Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana perkebunan dalam arti luas; c. Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana perdagangan;	1. Meningkatkan pembangunan sarpras ekonomi 2. Meningkatkan pembangunan sarpras pertanian dalam arti luas 3. Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarpras	a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan b. Meningkatkan sarpras ekonomi pertanian dalam arti luas, perdagangan, industri &, pariwisata c. Meningkatkan sarana

		d. Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana pengembangan industri dan pariwisata..	pendidikan 4. Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarpras di bidang pemerintahan.	prasarana kesehatan d. Meningkatkan sarana prasarana pendidikan e. Meningkatkan sarana prasarana bidang pemerintahan.
	2. Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan pelayanan kesehatan nagari	a. Meningkatnya ketersediaan pusat pelayanan kesehatan di nagari. b. Meningkatnya ketersediaan alat-alat pelayanan kesehatan di nagari.		
	3. Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan	a. Meningkatnya ketersediaan pusat-puast kegiatan pendidikan. b. Meningkatnya ketersediaan sarana penunjang kegiatan pendidikan.		
	4. Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana bidang pemerintahan	a. Meningkatnya ketersediaan gedung-gedung perkantoran beserta peralatannya bagi kegiatan pemerintahan nagari dan lembaga kemasyarakatan nagari		
4. Meningkatkan pembangunan di bidang kesehatan untuk mendorong derajat kesehatan masyarakat agar dapat bekerja lebih optimal dan memiliki harapan hidup yang lebih	1. Meningkatkan derajat kesehatan dan gizi masyarakat,	a. Meningkatnya umur harapan hidup masyarakat. b. Menurunnya angka kematian ibu melahirkan. c. Menurunnya angka kematian	1. Meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan bagi penduduk miskin. 2. Meningkatkan usaha promosi dan pencegahan penyakit.	a. Meningkatkan upaya pelayanan kesehatan secara profesional. b. Meningkatkan standar pelayanan minimal di bidang pelayanan kesehatan.

panjang.		bayi. d. Menurunnya prevalensi kekurangan gizi pada anak balita.	3. Meningkatkan peran serta pemberdayaan masyarakat	
	2. Optimalisasi kesehatan masyarakat	a. Semakin minimalnya presentase absensi para pekerja/pegawai/aparat yang disebabkan gangguan kesehatan. b. Menurunnya angka kesakitan akibat penyakit menular.		
5. Mengupayakan pelestarian sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan dan pemerataan pembangunan guna meningkatkan perekonomian.	1. Meningkatkan pengendalian perencanaan dan kerusakan lingkungan hidup	a. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pelestarian lingkungan	1. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian lingkungan dan sumber daya alam 2. Mengoptimalkan peran serta masyarakat terutama organisasi masyarakat peduli lingkungan 3. Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh untuk memacu pertumbuhan di seluruh wilayah dengan karakteristik masing-masing	a. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup. b. Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup dan konservasi sumber daya alam c. Mewujudkan kondisi wilayah Nagari Lunang Tiga yang lebih hijau (dominasi vegetasi) dan tersedianya sumber daya air yang lebih baik.

	2. Meningkatkan upaya perlindungan dan konservasi sumber daya alam	a. Meningkatnya upaya reboisasi. b. Meningkatnya ketersediaan air tanah/sumber air. c. Meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan bencana alam.		
6. Meningkatkan pembangunan ekonomi dengan mendorong semakin tumbuh dan berkembangnya pembangunan di bidang pertanian dalam arti luas, industri, perdagangan dan pariwisata.	1. Meningkatkan produksi pertanian dalam arti luas	a. Meningkatnya produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura. b. Meningkatnya produksi peternakan dan perikanan.	1. Meningkatkan ketrampilan SDM petani dalam arti luas dalam upaya peningkatan produksi. 2. Meningkatkan pendampingan petani untuk menjadi mitra usaha dengan pelaku perdagangan 3. Meningkatkan kerja sama pemerintah desa dengan investor guna pengembangan agrowisata. 4. Meningkatkan peran pasar local serta jejaring kemitraan serta promosi dan akses pemasaran bagi petani. 5. Meningkatkan penyediaan sarana produksi alsintan sarana irigasi melalui pompanisasi, pengembangan sumur usaha tani dan pemberdayaan P3A.	a. Meningkatkan produktivitas dan pemasaran produk unggulan. b. Meningkatkan kemampuan pengolahan lahan, teknik budidaya, pengolahan pasca panen, dan pemasaran serta kemitraan. c. Meningkatkan penyediaan pupuk dan sarana produksi pertanian. d. Memperkuat kelompok tani, lembaga keuangan mikro untuk modal petani, dan kelembagaan ekonomi lainnya yang berbasis ekonomi masyarakat.

	2. Meningkatkan pemasaran hasil produksi pertanian dalam arti luas	a. Meningkatnya akses pemasaran hasil produksi tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perikanan.		
	3. Meningkatkan pemberdayaan para pelaku usaha pertanian dalam arti luas	a. Meningkatnya peran pemberdayaan para pelaku pertanian dalam upaya peningkatan produksi pertanian. b. Meningkatnya keberhasilan pencegahan dan penanggulangan hama serta penyakit tanaman.		
	4. Meningkatkan penguasaan ketrampilan dan pembinaan pelaku usaha industri, perdagangan dan pariwisata	a. Meningkatnya ketrampilan usaha industri kecil dan berkembangnya usaha industri. b. Meningkat dan berkembangnya usaha perdagangan masyarakat. c. Meningkatnya usaha di bidang pariwisata. d. Meningkatnya dan berkembangnya lembaga keuangan mikro dan/atau koperasi sebagai wadah aktifitas ekonomi masyarakat.		

4.3. ARAH KEBIJAKAN dan PRIORITAS PEMBANGUNAN NAGARI

➤ PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

1. Penghasilan tetap, tunjangan dan operasional.
2. Sarana dan prasarana pemerintah nagari
3. Pelayanan administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan
4. Tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan
5. Pertanahan

➤ BIDANG PEMBANGUNAN NAGARI

1. Penyelenggaraan, pembangunan sarana dan prasarana, pemeliharaan pendidikan
2. Penyelenggaraan, pembangunan sarana dan prasarana, pemeliharaan Kesehatan
3. Penyelenggaraan, pembangunan sarana dan prasarana, pemeliharaan Pekerja umum dan tata ruang nagari
4. Penyelenggaraan, pembangunan sarana dan prasarana, pemeliharaan kawasan permukiman.
5. Penyelenggaraan, pembangunan sarana dan prasarana, pemeliharaan kehutanan dan lingkungan hidup.
6. Penyelenggaraan, pembangunan sarana dan prasarana, pemeliharaan perhubungan, komunikasi dan informatika.
7. Penyelenggaraan, pembangunan sarana dan prasarana, pemeliharaan energy dan sumber daya mineral.
8. Penyelenggaraan, pembangunan sarana dan prasarana, pemeliharaan pariwisata.

➤ BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT NAGARI

1. Ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
2. Pemeliharaan kebudayaan dan keagamaan
3. Kepemudaan dan olah raga
4. Pembinaan kelembagaan masyarakat

➤ BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NAGARI

1. Kelautan dan perikanan
2. Pertanian/perkebunan dan peternakan

3. Peningkatan kapasitas aparatur nagari
4. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
5. Bidang usaha mikro kecil/menegah dan koperasi
6. Penanaman modal
7. Perindustrian dan perdagangan
8. Pengembangan industri kecil skala nagari

➤ **PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK**

4. Penanggulangan Bencana dan keadaan darurat nagari.
5. Pembentukan dana cadangan.

BAB VII

PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari Lunang Tiga tahun 2018 - 2024 merupakan penjabaran visi, misi dan program Wali Nagari selama 6 (enam) tahun mendatang, yang dalam penyusunannya mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016 - 2021

RPJM Nagari Lunang Tiga tahun 2018 – 2024 merupakan pedoman, landasan dan referensi dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagari Lunang Tiga.

Kaidah Pelaksanaan

RPJM Nagari Lunang Tiga tahun 2018 - 2024 yang telah disusun ini hendaknya dapat dilaksanakan secara konsisten, jujur, transparan, partisipatif dan penuh tanggung jawab. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Seluruh lembaga di wilayah Nagari Lunang Tiga, serta masyarakat termasuk dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam RPJM Nagari tahun 2018 - 2024 dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.
2. Satuan Kerja Pemerintah Nagari Lunang Tiga atau lembaga - lembaga yang ada wajib untuk menyusun Rencana Strategis yang memuat visi, misi, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pokok pembangunan sesuai lembaga-lembaga dengan berpedoman pada dokumen review RPJM Nagari Lunang Tiga 2018 - 2024
3. Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan Review RPJM Nagari Lunang Tiga Tahun 2018 - 2024 perlu dilaksanakan Evaluasi Tahunan terhadap

pencapaian Tujuan dan sasaran Pelaksanaan Kegiatan untuk mengetahui kemajuan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan pembangunan Nagari Lunang Tiga

4. Mengingat bantuan keuangan, serta bantuan sarana/prasarana lainnya yang sumbernya dari APBN, APBD Kabupaten Pesisir Selatan maupun APBD Provinsi Sumatera barat tidak dapat diprediksi atau tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga program / kegiatan yang diharapkan mendapat bantuan tersebut tidak / belum dapat direalisasikan. Hal tersebut disebabkan tidak adanya bantuan dari jajaran pemerintah Kabupaten, Provinsi maupun Pusat.

Wali Nagari Lunang Tiga



M. SOBIRIN, SH